

Submitted: 20-10-2022

Accepted: 16-06-2023

Published: 30-06-2023

DARI POLITIK KE POLITIKNYA ALLAH: MEMAKNAI POLITIK PILPRES 2024 DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF 1 SAMUEL 8:4-9; 16:7, 11-13

*FROM POLITICS TO THEOPOLITICS:
INTERPRETING POLITICS PRESIDENTIAL
ELECTION 2024 IN INDONESIA FROM
PERSPECTIVE OF 1 SAMUEL 8:4-9; 16:7, 11-13*

Salomo Sihombing

Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat, Indonesia

salomosihombing93@gmail.com

ABSTRACT

This paper focuses on the political context in Indonesia, especially the presidential election, (presidential-election) which will be held in 2024. The side that is trying to be described and analyzed is related to interpreting politics (Pilpres in 2024) from the perspective of 1 Samuel 8:4-9; 16:7, 11-13. The research method used is qualitative. The process begins by providing brief historical data relating to the election of the President and Vice President since the direct election by the people of Indonesia in 2004 until now, for the preparation to presidential-election in 2024. Continuing with the presentation of the current political map in Indonesia, the political narratives raised by both the power and opposition sides to see their contribution to the progress of the nation. Through this process, it is clear that politics leading to the 2024 presidential election is based on human politics (politics). Meanwhile, through the hermeneutic process 1 Samuel 8:4-9; 16:7, 11-13 shows that the succession of leadership that occurs is in the political act of God (Theopolitics). Thus, there is a shift in meaning from "Politics" to "Theopolitics."

Keyphrase: politics; theopolitics; presidential-election; 1 Samuel.



ABSTRAK

Tulisan ini berfokus pada konteks perpolitikan di Indonesia, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan terselenggara pada tahun 2024. Sisi yang coba dideskripsikan dan dianalisis adalah terkait memaknai politik (Pilpres 2024) tersebut dari perspektif 1 Samuel 8:4-9; 16:7, 11-13. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Prosesnya diawali dengan memberikan data sejarah ringkas yang berhubungan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak berlangsungnya pemilihan secara langsung oleh rakyat (2004) sampai saat ini. Lanjut kepada pemaparan peta perpolitikan di Indonesia sekarang, narasi-narasi politis yang dimunculkan baik oleh sisi kekuasaan dan juga sisi oposisi untuk melihat sumbangsihnya bagi kemajuan bangsa. Melalui proses itu terlihat jelas bahwa perpolitikan menuju Pilpres 2024 bertumpu pada politik manusia (*politics*). Sementara, melalui proses hermeneutika 1 Samuel 8:4-9; 16:7, 11-13 ditunjukkan bahwa suksesi kepemimpinan yang terjadi ada dalam tindakan politis-Nya Allah (*Theopolitics*). Dengan demikian, terjadi pergeseran makna dari “*Politics*” ke “*Theopolitics*.“

Frasa kunci: politik; politiknya Allah; Pilpres; 1 Samuel.

PENDAHULUAN

Bumi pertiwi Indonesia sudah mulai dihebohkan oleh percaturan politik dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum (pemilu) di tahun 2024, khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sejatinya, masih ada rentang waktu (kurang lebih) satu tahun enam bulan lagi sehubungan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden tersebut.¹ Namun demikian, harus diakui bahwa rakyat Indonesia sudah mulai digiring pada wacana politik terkait siapa yang layak menjadi *successor* dari Presiden Joko Widodo setelah dua periode kepemimpinannya, pada Pilpres 2024 mendatang. Karenanya, berbagai bakal calon Presiden mulai dimunculkan ke hadapan publik, baik oleh masyarakat dan juga oleh berbagai Partai Politik baik yang lama dan juga Partai Politik yang baru muncul.² Sehubungan dengan itu, menjadi menarik untuk memperhatikan berita baru-baru ini yang muncul ke publik (viral).

¹Muhammad Wahdini, “The Effectiveness of Simultaneous Election 2019: Evaluation Through the Simultaneous Election 2024,” *Jurnal Bina Praja*. Vol. 14, No. 1 (2022): 123. doi: 10.21787/jbp.14.2022.123-134.

²Fitria Barokah et al., “Disrupsi Politik,” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 21, No. 1 (2022): 4-6. doi: 10.35967/njip.v21i1.273.



Berita yang dimaksud adalah kehadiran Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Presiden Indonesia yang keenam dengan narasi “Turun-gunungnya” di hadapan publik. Apa sebenarnya yang disampaikan oleh SBY dalam narasi turun gunung tersebut? Berikut pernyataan SBY:

“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka, tuturnya.”³

Pernyataan ini disampaikan oleh SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat. Artinya, ada kekhawatiran berdasar pada informasi yang diperoleh SBY terkait kemungkinan tidak *fair*-nya penyelenggaraan pemilu, khususnya Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Perlu diketahui, pernyataan yang dilontarkan SBY ini telah menimbulkan polemik dan telah memunculkan respons yang beragam dari berbagai kalangan, khususnya partai politik. Salah satu respons yang muncul dan cukup viral adalah perdebatan antara Adian Napitupulu, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Jansen Sitindaon, kader Partai Demokrat.⁴ Keduanya beradu argumen terkait apa sebenarnya maksud dari pernyataan SBY dalam hubungannya dengan penyelenggaraan Pilpres di tahun 2024. Partai Politik lainnya, seperti Golkar melalui Wakil Ketua Umumnya Nurul Arifin dan PKB juga melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawaid berkata: “sebaiknya kita tidak berburuk sangka, tapi turut mengedukasi pemilih untuk cerdas, menawarkan politik yang bersih, dan jujur.”⁵ Terlihat jelas, begitu pentingnya penyelenggaraan pemilu, khususnya Pilpres bagi republik ini. Kenyataan ini menimbulkan kegelisahan yang akhirnya melahirkan beberapa pertanyaan mendasar

³Achmad Rizki Muazam, “SBY Turun Gunung, Jusuf Kalla: Itu Peringatan Bagi Pengusa!,” populis.id, 2022, <https://populis.id/read35516/sby-turun-gunung-jusuf-kalla-itu-peringatan-bagi-pengusa>.

⁴TvOne, “Silang Pendapat, Adian Napitupulu Vs Jansen Sitindaon Soal Akan Ada Kecurangan di Pemilu 2024,” tvOneNews, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=iUW4aNBB8qc>.

⁵Nicholas Ryan Aditya, “SBY Terpojok, Diminta Elite Parpol Agar Tak Buat Gaduh Jelang Pemilu 2024,” kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/07341501/sby-terpojok-diminta-elite-parpol-agar-tak-buat-gaduh-jelang-pemilu-2024>.



berikut: 1) apakah politik dan narasi-narasi yang dibangun adalah untuk pemenuhan kepentingan bangsa? 2) Apakah untuk pemenuhan kepentingan Partai Politik? 3) Kemenangan dan kekuasaan siapa yang hendak ditonjolkan ke hadapan publik melalui Pilpres tersebut?

Ketiga pertanyaan di atas akan bermuara pada pertanyaan utama yang menjadi fokus dari tulisan ini, yaitu siapa sebenarnya yang berpolitik dan apa tujuannya? Pertanyaan ini tentu berkaitan dengan politik (Pilpres) tahun 2024 mendatang yang coba dimaknai dari perspektif 1 Samuel 8:4-9; 16:7, 11-13. Mengapa menggunakan perspektif 1 Samuel 8:4-9; 16:7, 11-13? Teks ini jarang disentuh dalam hubungannya dengan tema politik, secara khusus di Indonesia. Karenanya, menjadi perlu untuk melihat sisi kebaruan yang coba ditawarkan dari penelitian ini dengan memberi perbandingan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian, terkait politik yang baru-baru ini terbit menitikberatkan perhatiannya pada apa yang dapat dilakukan oleh umat Allah secara partisipatoris dalam konteks politik. Dengan menelisiknya dari sisi biblika-Perjanjian Lama (PL) yang bernuansa umum dan normatif. Misalnya, Sihombing yang menyimpulkan bahwa orang percaya berpartisipasi dan bertanggung jawab menghadirkan politik yang berkenan dalam pandangan Allah.⁶ Senada dengan itu, Sipahutar mengatakan bahwa setiap warga negara, turut berpartisipasi dalam mewujudnyatakan pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan bertanggung jawab dengan terlibat memberikan suaranya pada pemilu.⁷

Sama halnya dengan Susanta⁸, Arifianto dan Suseno⁹ yang berkata bahwa orang percaya harus menjadi berkat dan bertanggung jawab untuk menghadirkan politik yang sehat. Bercermin dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas memberi penekanan pada peran umat Allah terkait partisipasinya dalam konteks perpolitikan di Indonesia. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah di mana peran Allah?

⁶Salomo Sihombing, “Politics Based on a Biblical Perspective and Its Implications for the Involvement of Believers in Politics”, *Jurnal Jaffray*. Vol. 20, No. 1 (2022): 71. doi: 10.25278/jj.v20i1.619.

⁷Roy Charly Sipahutar, “Teokrasi dan Demokrasi: Komparasi Reflektif Teokrasi Israel Kitab Suci Dengan Demokrasi Langsung Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Tangkole Putai*. Vol. 15, No. 2 (2018): 99.

⁸Yohanes Krismantyo Susanta, “Orang Kristen dan Politik: Belajar dari Kasus Salomo dan Adonia dalam Persaingan Menuju Takhta” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*. Vol. 4, No. 1 (2019): 35. doi: 10.30648/dun.v4i1.187.

⁹Yonatan Alex Arifianto Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala Indonesia dan Aji Suseno Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, “Filsafat Politik dan Praktisnya dalam Perspektif Iman Kristen”, *Jurnal Teologi dan Pelayanan*. Vol. 6, No. 2 (2020): 88–9.



Tidak bolehkah Allah berpolitik? Haruskah *vox populi* menjadi *vox dei*? Itulah sebabnya, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa seluruh pertanyaan yang mungkin dimunculkan, pada gilirannya akan bermuara pada pertanyaan utama, yaitu siapa sebenarnya yang berpolitik dan apa tujuannya? Karenanya, tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan tawaran teologis-biblis dari perspektif 1 Samuel 8:4-9; 16:7, 11-13 dalam rangka memaknai politik (Pilpres 2024) di Indonesia. Tawaran teologis-biblis yang akan dihadirkan, utamanya berfokus pada pergeseran konsep dari “*Politics* ke *Theopolitics*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasar pada metode kualitatif dengan bermaksud menelusuri tulisan-tulisan terdahulu, terkait perpolitikan di Indonesia (Pilpres 2004-sekarang) yang akan dimaknai dari perspektif 1 Samuel 8:4-9; 16:7, 11-13. Karenanya, hal yang dilakukan terlebih dahulu adalah memaparkan sejarah ringkas Pemilihan Presiden sejak tahun 2004 sampai sekarang dan gambaran terkini terkait peta perpolitikan di Indonesia.

Paparan mengenai narasi kekuasaan dan oposisi dalam kaitannya dengan kemajuan bangsa atau kepentingan Partai Politik juga akan dibahas. Pada gilirannya, proses hermeneutika dengan menganalisis teks 1 Samuel 8:4-9 dan 16:7, 11-13 menjadi landasan utama yang digunakan untuk memaknai politik (Pilpres) di Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Setelahnya akan diberikan tawaran teologis-biblis sebagai pijakan dari paparan yang telah diberikan dalam tulisan ini. Tawaran teologis-biblis yang dimaksud berfokus pada pergeseran konsep “*Politics* ke *Theopolitics*” dalam konteks Indonesia. Kesimpulan akan diberikan sebagai penutup dari keseluruhan tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SEJARAH DAN PETA PERPOLITIKAN (PILPRES) DI INDONESIA MULAI TAHUN 2004 HINGGA SEKARANG

Sejarah Ringkas Perpolitikan di Indonesia (Pilpres 2004-Sekarang)

Bagian ini berfokus pada permulaan dari dipraktikkannya sistem baru pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung melalui pemilu oleh rakyat pada tahun 2004 sampai sekarang, yang berhubungan dengan pemilu di tahun 2024. Aspinal dan Berenschot mencatat bahwa pemilihan Presiden secara langsung bukanlah faktor utama yang mendorong masifikasi politik *patronase*, meski pun dapat membantu mengurangi sentralitas partai politik



(parpol) dalam lanskap pemilu di Indonesia.¹⁰ Artinya, pemilihan secara langsung oleh rakyat dengan masifnya peran parpol belum menjadi solusi final. Mengapa? Badrun yang meminjam perspektif Gabriel A. Almond menjelaskan bahwa dari sisi kapabilitas sistem politik suatu negara, maka sistem politik Indonesia saat ini sesungguhnya berada pada posisi yang lemah.¹¹ Terkait kapabilitas tersebut, setidaknya ada enam kriteria/bidang yang harus dimiliki dalam sistem politik yang efektif, yaitu: 1) bidang ekstraktif , 2) distributif, 3) regulatif, 4) simbolik, 5) responsif , dan 6) kapabilitas domestik dan Internasional.¹²

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa melalui keenam kapabilitas sistem politik tersebut, harus diakui bahwa sistem politik Indonesia masih masuk dalam posisi yang lemah. Dengan kata lain, sistem politik Indonesia belum mampu memenuhi enam kapabilitas yang dimaksud secara maksimal dan efektif. Namun demikian, proses perkembangan sistem politik di Indonesia tetap dan terus diupayakan, sehingga pemilihan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden patut diapresiasi. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 secara jelas menyebutkan bahwa yang termasuk dalam arena pemilu adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD)¹³. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)¹⁴

¹⁰Edward Aspinall, Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 108.

¹¹Ubedilah Badrun, *Sistem Politik Indonesia: Kritik Dan Solusi Sistem Politik Yang Efektif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 3.

¹²Kapabilitas bidang ekstraktif adalah kemampuan sistem politik untuk melakukan eksplorasi potensi yang ada pada sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Distributif adalah kemampuan mengelola dan mendistribusikan sumber daya alam dan manusia berupa barang, jasa, kesempatan kerja, bahkan kehormatan dapat diberi predikat sebagai prestasi real dari sistem politik. Regulatif: kemampuan menyusun peraturan perundungan untuk mengawasi, mengatur, dan mengendalikan. Simbolik adalah kemampuan untuk membangun pencitraan terhadap kepala negara atau juga rasa bangga terhadap negara. Responsif adalah kemampuan daya tanggap yang diciptakan oleh pemerintah terhadap tuntutan atau tekanan. Kapabilitas domestik dan Internasional: kemampuan pemerintah untuk berinteraksi di lingkungan domestik atau pun luar negeri. M. Fadhillah Harnawansyah, *Sistem Politik Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 77-81.

¹³Pasal 2 ayat 1 UUD NRI 1945 berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Penegasan mengenai anggota DPR dipilih melalui pemilu juga ditemukan dalam Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945, kemudian pemilihan DPD melalui pemilu terdapat pula dalam Pasal 22C ayat (1).

¹⁴Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: "Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."



serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden¹⁵. Dapat dikatakan bahwa proses pemilihan langsung yang diawali tahun 2004 pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi upaya nyata memanifestasikan isi dari UUD NRI 1945 khususnya pasal 6A ayat (1) dan ayat (2). Sejak saat itu percaturan politik di Indonesia mulai aktif dan masif, bahkan tidak jarang menjadi permisif demi mencapai agenda dari masing-masing partai politik (parpol).

Pada tahun 2004 pemilihan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat telah dimulai dan melibatkan koalisi partai yang tidak sedikit. Mujani et al, yang dikutip oleh Ekawati membuat tabel terkait peta koalisi parpol dan hasilnya pada pemilihan Presiden (Pilpres) tersebut sebagai berikut:¹⁶

No.	Putaran 1	Hasil (%)	Partai Pendukung	Putaran 2	Hasil (%)
1.	Wiranto-Salahudin	22.19	Golkar, PKB		
2.	Megawati–Hasyim Muzadi	26.24	PDIP, PDS	Megawati–Hasyim Muzadi	39.38
3.	Amien Rais–Siswono Yudo Husodo	14.94	PAN, PBR, PKS, PNBK, PSI		
4.	SBY–Jusuf Kalla	33.58	Partai Demokrat (PD), PBB, PKPI	SBY–Jusuf Kalla	60.62
5.	Hamzah Haz–Agum Gumelar	3.05	PPP		

Tabel 1. Hasil Pemilu 2004

¹⁵Pasal 6A ayat (1) berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, dan ayat (2) berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

¹⁶Esty Ekawati, “Peta Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*. Vol. 7, No. 2 (2019): 165. doi: 10.31289/jppuma.v7i2.2680.



Melalui tabel di atas, terlihat jelas bahwa dari kelima calon Presiden dan Wakil Presiden pada putaran pertama, menghasilkan persentase terbanyak menunjuk pada dua calon terkuat yaitu pasangan Megawati-Hasyim Muzadi (26.24%) dan SBY-Jusuf Kalla (33.58%). Selanjutnya kedua calon tersebut dipilih kembali pada putaran kedua dan menunjuk pasangan SBY-Jusuf Kalla yang didukung koalisi PD, PBB, PKPI, PKS, PPDK, PP, dan PPDI sebagai pemenangnya dengan persentase pemilih 60.62%. Dengan demikian, SBY-Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga diberi mandat untuk memimpin Indonesia dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2004-2009. Karenanya, SBY dan Jusuf Kalla diharapkan mampu menjawab secara konkret yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dan memberikan perubahan nyata bagi kemajuan bangsa.

Berlanjut pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang memenangkan pasangan SBY-Boediono dengan raihan suara 73.874.562 (60.80%) dan mengalahkan pasangan Megawati-Prabowo serta Jusuf Kalla-Wiranto yang masing-masing meraih suara 32.548.105 (26.79%), 15.081.814 (12.41%).¹⁷ Dengan kata lain, SBY tetap memimpin dengan menjadi Presiden meski pun wakilnya adalah Boediono untuk periode kedua (2009-2014). Perlu dicatat bahwa kemenangan tersebut adalah hasil dari koalisi banyak parpol seperti: 1) Partai Demokrat, 2) PAN, 3) PKS, 4) PKB, 5), dan 6) PPP dari partai yang ada di Parlemen. Selebihnya ada dukungan delapan belas partai non-parlemen yang tidak lolos *Parliamentary Threshold (PT-1)* yaitu: PBB, PBR, PDS, PKPI, PKPB, Partai Patriot, PNBKI, PPI, PPRN, PDP, PPPI, Partai Republikan, PKDI, PIS, PPIB, PPDI, dan PPD.¹⁸ Menjadi jelas bahwa kemenangan, baik tahun 2004 dan juga 2009 tersebut sangat dipengaruhi oleh koalisi partai politik yang masing-masing punya “Kepentingan politik” di dalamnya. Jalal mencatat bahwa ciri utama dari kepemimpinan SBY adalah politik akomodatif, sebab SBY mengakomodasi kepentingan politik elite-elite parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintahannya.¹⁹

Setelah berakhirnya pemerintahan SBY untuk periode yang kedua, maka berlanjut pada Pilpres tahun 2014 di mana sosok Joko Widodo yang

¹⁷Lili Romli, “Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi,” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*. Vol. 8, No. 2 (2018): 97–8. doi: 10.22212/jp.v8i2.1138.

¹⁸Romli, 101.

¹⁹Asran Jalal, “Sistem Presidensial Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden,” *Jurnal Sosial Dan Humaniora*. Vol. 6, No. 2 (2021): 166–8. doi: 10.47313/pjsh.v6i2.1256.



fenomenal dan sedang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta muncul ke permukaan. Singkatnya, Joko Widodo akhirnya terpilih menjadi Presiden untuk periode 2014-2019. Kemenangan itu berlanjut pada periode kedua, 2019-2024. Sejak pemilihan langsung pada tahun 2004 sampai periode kedua masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menunjukkan signifikansi dari kekuatan dari suara rakyat yang terwadahi melalui kehadiran berbagai Partai Politik di Indonesia. Karenanya, menjadi tepat bila diberi simpulan bahwa sejarah proses perpolitikan (Pilpres) di Indonesia memberikan gambaran yang tidak lagi samar, namun jelas di mana peran dari suara rakyat (*vox populi*) menjadi yang sentral dan utama.

Peta Perpolitikan Menuju Pilpres 2024

Adanya *Parliamentary Threshold (PT-1)* pada pemilihan Presiden tahun 2009 dan beralih menjadi *Presidential Threshold (PT-2)* pada pemilihan Presiden tahun 2019. Harus diakui bahwa *PT-2* memberikan ketertarikan dan atau tantangan tersendiri ketika hendak membahas terkait perpolitikan yang coba dibangun oleh berbagai parpol menuju pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. Mengapa? Penetapan *PT-2* yang terdapat pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.²⁰ Sekali lagi, sebagai catatan bahwa *PT-2* ini sudah mulai diberlakukan sejak Pilpres pada tahun 2019.

Dengan diberlakukannya *PT-2* tersebut, maka setiap parpol dipastikan akan berusaha menggalang koalisi agar dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikehendaki dan berpeluang besar untuk menang. PDIP sebagai partai dari penguasa saat ini dapat memenuhi persyaratan dari *PT-2* tanpa harus berkoalisi, sementara partai besar lainnya seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, dll. harus berkoalisi. Itulah sebabnya, safari politik atau bahkan “*Bargaining politics*” mulai gencar dilakukan oleh setiap parpol pada tahun ini. Koalisi itu menitikberatkan pada tokoh yang hendak diusulkan sebagai bakal calon Presiden. Baru-baru ini lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei seandainya pemilu serentak 2024 digelar. Hasilnya menunjukkan suara perolehan

²⁰Muhammad Lutfi and Mochamat Nurdin, “Presidential Threshold : Expectations and Challenges of the Presidential Candidate 2024,” *Journal of Government Insight*. Vol. 2, No. 1 (2022): 150–4. doi: 10.47030/jgi.v1i1.53.



Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sementara mengungguli elektabilitas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.²¹

Survei tersebut digelar pada 10-17 April 2022 di 122 desa/kelurahan yang tersebar di Indonesia. Total 1.220 responden yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau *multistage random sampling*. Ada pun *margin of error* survei ini ($\pm 2,83$ persen) pada tingkat kepercayaan atau *level of confidence* sebesar 95 persen.²² Ada nama lain seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno yang melengkapi lima besar bakal calon Presiden. Dengan kata lain, Ganjar sebagai perwakilan PDIP meski pun masih diperhadapkan dengan keberadaan Puan Maharani, Prabowo sebagai perwakilan Gerindra, Anies yang didukung oleh Nasdem, akan berupaya menciptakan koalisi dengan partai-partai lainnya.

Beritasatu.com melaporkan setidaknya ada dua koalisi yang telah terbentuk sejauh ini: 1) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 2) Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang diinisiasi Partai Gerindra dan PKB. Sinyal koalisi lain yang akan terbentuk adalah koalisi bentukan Nasdem, Demokrat, dan PKS.²³ Masing-masing petinggi partai tersebut sedang melakukan komunikasi untuk membentuk kerja sama politik. Di sisi lain, PDIP terus melakukan safari politik ke semua parpol lewat Ketua DPP PDIP yaitu Puan Maharani. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah menjelaskan bahwa partainya mempertimbangkan untuk mengusung sendiri pasangan capres dan cawapres karena sudah memenuhi *PT-2*. Namun demikian, yang namanya politik selalu bersifat cair dan dinamis.

Peta perpolitikan (Pilpres) lewat koalisi masing-masing Partai Politik yang ada saat ini memang menjadi gambaran terkait upaya-upaya untuk menjadi pemenang pada Pemilu (Pilpres) pada tahun 2024 mendatang. Suara rakyat yang menyebar dari Sabang sampai Merauke coba diraih dan diwadahi oleh masing-masing Partai Politik yang ada. Dengan kata lain, tawar-menawar (*bargaining politics*) akan terus diupayakan dalam rangka mencapai tujuan dari masing-masing Partai Politik dengan berlindung

²¹Firda Cynthia Anggrainy, “Survei Capres Charta Politika: Ganjar, Prabowo dan Anies Masih 3 Besar,” news.detik.com, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6050167/survei-capres-charta-politika-ganjar-prabowo-dan-anies-masih-3-besar>.

²²Anggrainy.

²³Yustinus Paat, “Ini Peta Politik Koalisi Partai Politik Menuju Pilpres 2024,” beritasatu.com, 2022, <https://www.beritasatu.com/news/978715/ini-peta-politik-koalisi-partai-politik-menuju-pilpres-2024>.



dibalik narasi-narasi politik untuk mengedepankan kepentingan bangsa. Itulah sebabnya, melalui peta perpolitikan yang masih bersifat cair dan dinamis itu akan lebih lanjut disorot dari sisi narasi-narasi yang dimunculkan baik dari sisi kekuasaan dan juga dari sisi oposisi. Tujuannya adalah untuk mencermati apakah benar narasi-narasi politis yang dimunculkan adalah untuk kemajuan bangsa atau justru untuk kepentingan Partai Politik?

NARASI KEKUASAAN DAN OPOSISI: BAGI KEMAJUAN BANGSA ATAU KEPENTINGAN PARTAI POLITIK?

Sudah menjadi barang pasti, di mana narasi-narasi berupaya atau coba dimunculkan baik dari sisi pemegang kekuasaan saat ini dan juga dari sisi oposisi. Karenanya, pertanyaan penting dan mendasar yang patut dilontarkan adalah: 1) narasi-narasi apa yang dimunculkan oleh keduanya? 2) Apakah narasi yang dimunculkan bersumbangsih kepada kepentingan dan kemajuan bangsa atau justru bagi kepentingan parpol? Kedua pertanyaan tersebut menjadi perlu untuk dipaparkan lebih lanjut dan dihubungkan dengan pertanyaan penting berikut, Pilpres 2024 kemenangan dan kekuasaan siapa? Bagian-bagian ini dimaksudkan sebagai jembatan kepada proses hermeneutika 1 Samuel 8:4-9 dan 16:7, 11-13.

Narasi Kekuasaan

Pemerintahan yang sekarang ini telah memimpin sejak tahun 2019. Artinya, telah berada pada kursi kekuasaan atau kepemimpinan selama (\pm) tiga tahun dengan dukungan berbagai Partai Politik di dalam menjalankan roda pemerintahan. Narasi yang coba dibangun oleh kubu kekuasaan adalah narasi kebangsaan atau nasionalisme, di mana narasi itu terrepresentasi melalui sosok seorang Presiden Joko Widodo. Mengapa? Alasannya, karena sudah menjadi kesepakatan umum bahwa Presiden Joko Widodo didukung oleh kelompok yang nasionalis.²⁴ Sebaliknya, lawan politik Joko Widodo sebelumnya (Pilpres 2019) adalah Prabowo Subianto yang disebut mewakili kelompok “Islam-politik”.²⁵ Dengan demikian, narasi kebangsaan yang coba dibangun oleh sisi kekuasaan adalah narasi politik yang sedikit banyak hendak mempertahankan kelompok pendukungnya demi kepentingan Pilpres 2024. Terlepas dari siapa yang

²⁴Arifki Chaniago, “Pilpres 2024: Berebut Narasi Ruang Publik,” kompas.com, 2022.

²⁵Chaniago.



akan dicalonkan oleh berbagai partai politik yang mendukung pemerintah saat ini, kepentingan Pilpres 2024 yang menjadi fokus utama ketimbang kepentingan bangsa.

Narasi Oposisi

Poros oposisi selalu hadir dalam rangka menyeimbangkan roda pemerintahan yang sedang berjalan, begitu kira-kira tujuan idealnya. Karenanya, narasi dari pihak oposisi saat ini tidak jarang akan melontarkan kritikan-kritikan tajam kepada pemerintah/penguasa sekarang ini. Semisal yang telah disinggung pada bagian pendahuluan adalah narasi turun gunungnya SBY yang telah menimbulkan polemik di antara berbagai pihak baik Partai Politik dan juga pemerintah saat ini. Salah tujuan mendasar dari kehadiran SBY ke hadapan publik adalah untuk memastikan kepentingan politik dari Partainya akan tersalurkan di Pilpres 2024. Artinya, upaya-upaya yang dilakukan pihak oposisi melalui narasinya adalah menggiring opini publik untuk berfokus pada narasi politis yang disampaikan. Dengan kata lain, juga lebih mengutamakan kepentingan dari Partai Politiknya ketimbang kepentingan bangsa ini.

Pilpres 2024 Kemenangan dan Kekuasaan Siapa?

Menjadi partai pemenang pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024 mendatang adalah harapan semua parpol yang ada di Indonesia. Tentu, kemenangan dan kekuasaan itu akan dipercayakan kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang telah diusung oleh masing-masing koalisi Partai Politik yang ada. Namun demikian, ada narasi yang sangat lazim disampaikan, bahwa siapa pun yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka pemenangnya adalah seluruh rakyat Indonesia, betulkah demikian? Benarkah pandangan yang menegaskan bahwa *vox populi* sebagai *vox dei*? Suara rakyat sebagai suara Tuhan? Atau sebenarnya suara Allahlah yang seharusnya menjadi suara rakyat?

Macril mengonfirmasi bahwa Indonesia merupakan negara yang memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kedaulatan rakyat yang mengandung pepatah “*vox populi vox dei*”. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi”.²⁶ Artinya, negara Indonesia mengakui kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi.

²⁶Oce Madril and Universitas Gadjah Mada, “The Authority of Administrative Court in Settling Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada,” *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. 8, No. 3 (2019): 365–7. doi: 10.20961/yustisia.v8i3.35553.



Berdasar hal itu, harus diakui bahwa bangsa Indonesia melalui rakyatnya memegang teguh prinsip “*vox populi*” sebagai “*vox dei*”. Karenanya, jika ditanyakan siapa yang akan menjadi pemenang/penguasa pada Pilpres tahun 2024 mendatang? Jawabnya, jelas dan tegas pemenangnya adalah seluruh rakyat Indonesia yang dipresentasikan oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih.

MEMAKNAI POLITIK (PILPRES 2024) DARI PERSPEKTIF 1 SAMUEL 8:4-9; 16:7, 11-13

Pemaparan mengenai sejarah perpolitikan di Indonesia (Pilpres), peta perpolitikan saat ini, narasi kekuasaan dan oposisi serta pembahasan pertanyaan mengenai kemenangan dan kekuasaan siapa sebenarnya Pilpres 2024 yang akan datang menjadi pintu masuk bagi proses hermeneutika 1 Samuel 8:4-9 dan 16:7, 11-13. Dengan kata lain, proses hermeneutika 1 Samuel 8:4-9 dan 16:7, 11-13 merupakan perspektif yang digunakan untuk memaknai politik, khususnya Pilpres 2024 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Dengan demikian, bagian-bagian yang telah dibahas tersebut menjadi jembatan kepada fokus utama tulisan ini. Itulah sebabnya , bagian berikut ini akan berfokus pada hermeneutika 1 Samuel 8:4-9; 16:7, 11-13, politik (Pilpres-2024) dalam perspektif 1 Samuel 8:4-9 dan 16:7, 11-13.

Hermeneutika 1 Samuel 8:4-9 dan 16:7, 11-13

Kitab 1 Samuel 8:4-9 dan 16:7, 11-13 dipilih untuk memberikan komparasi sehubungan dengan awal baru dari proses peralihan kepemimpinan di kalangan umat Israel. Proses peralihan yang diharapkan terjadi adalah suksesi kepemimpinan dari seorang hakim, yaitu Samuel kepada seorang raja yang dimohonkan oleh umat Israel kepada Allah. Indikasinya adalah umat Israel ingin sama seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki seorang raja. Atas dasar keinginan itulah umat Israel, khususnya semua tua-tua berkumpul dan menemui Samuel di Rama (ay. 4). Mereka berkata kepada Samuel: “Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau; maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain (ay. 5)”. Pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pengumpulan suara rakyat/umat Israel yang menghendaki terjadi suksesi kepemimpinan bagi bangsa Israel. Artinya, nuansa politis dari umat Israel cukup kental diperlihatkan. Karenanya, menjadi perlu untuk menelisik makna frasa “Angkatlah seorang raja” dari bahasa aslinya.



Frasa tersebut dalam bahasa aslinya adalah שִׁימַה לְנוּ מָלֵךְ (*šimah-lə-nū me-lek*) yang berbentuk *qal imperative*. Dengan kata lain, perintah yang ditujukan kepada Allah melalui Samuel ini merupakan perintah/permohonan untuk “Menunjuk” seorang raja bagi orang Israel. Mengapa menunjuk seorang raja? Perlu diketahui, bahwa kata שִׁימַה (*šimah*) berasal dari kata שָׁוֹם (*sum*) yang dapat berarti: meletakkan, membuat, mengatur, atau menunjuk. Maka dalam konteks ini, istilah “Menunjuk” sepertinya lebih tepat.²⁷ Dengan demikian, tepatlah yang dikatakan oleh Baldwin, Samuel diminta oleh tua-tua Israel untuk “Menunjuk” seorang raja atas mereka, seperti halnya dengan bangsa lain.²⁸ Sebenarnya Samuel tidak berterima dengan kehendak dari tua-tua Israel tersebut, sehingga ia berkonsultasi dengan Allah melalui doanya.

Menarik memperhatikan respons Allah yang menegaskan bahwa tua-tua Israel dalam tindakannya tidak sedang menolak Samuel, tetapi menolak Allah sendiri. Sederhananya, dapat dikatakan kalau bangsa Israel sedang berupaya menggantikan keberadaan Allah sebagai Raja sejati dengan raja yang mereka kehendaki. Inilah yang menjadi sumber persoalan utama dalam hubungannya dengan upaya politik yang dilakukan oleh semua tua-tua Israel yang bersepakat menyatukan suara mereka. Putra mengatakan bahwa tendensi yang ditunjukkan melalui tindakan tua-tua Israel itu menjurus kepada kesepakatan politis untuk menolak pemerintahan Allah (*Teokrasi*).²⁹ Itulah sebabnya, istilah menolak yang digunakan dalam bahasa aslinya adalah מָאַסְתָּה (*mā-aṣṭah*) bentuk *qal perfect* dari akar kata מָאַסְתָּה (*ma'as*) yang berarti “Mereka telah menolak”.³⁰ Siapa yang mereka tolak? Ya Allah sendiri yang telah mereka tolak (ay. 7).

Namun demikian, Allah memerintahkan Samuel untuk mendengarkan permintaan mereka dengan tetap memperingatkan mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka (ay. 9). Peringatan ini menjadi penting dan Samuel menyampaikannya kepada bangsa itu secara lengkap (ay. 10-22). Tampaknya, tujuan politis dari semua tua-tua yang mewakili umat Israel itu hampir mencapai tujuannya, sesuai rencana yang telah mereka sepakati. Benarkah tujuan politis umat Israel yang akan

²⁷Ralph W. Klein, *Word Biblical Commentary: 1 Samuel* (Nashville: Thomas Nelson, Inc., 2000), 76.

²⁸Joyce G. Baldwin, *Tyndale Old Testament Commentaries: 1 and 2 Samuel Volume 8* (England: InterVarsity Press, 2008), 90.

²⁹Adi Putra, “Monarki: Penolakan Terhadap Teokrasi,” *Explore Contact FAQ*. (2021): 7. doi:10.31219/osf.io/4zqau.

³⁰Klein, *Word Biblical Commentary: 1 Samuel*, 95.



terwujud? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu beralih pada proses pemilihan Saul menjadi raja pertama di Israel. Kemudian dapat membaca narasi berikutnya, di mana Allah berkata kepada Samuel bahwa Ia akan menyuruh kepadanya seorang laki-laki dari tanah Benyamin dan akan diurapi menjadi raja (1Sam. 9:17). Siapakah seorang laki-laki yang dimaksud? Dia adalah Saul. Perhatikan pernyataan Allah kepada Samuel, “Aku akan menyuruh … engkau akan mengurapi dia (Saul) menjadi raja (ay. 16). Pernyataan Allah ini sangat penting dalam rangka menjawab pertanyaan utama tulisan ini, yaitu siapa sebenarnya yang berpolitik dan apa tujuannya (hlm. 4). Apakah semua tua-tua yang mewakili umat Israel yang sedang berpolitik dengan segala tujuan yang mereka miliki?

Frasa “Aku akan menyuruh” dalam bahasa aslinya adalah חָלַח ('e·lah) bentuk *qal imperfect* dari חָלַשׁ (*shalach*) yang dapat berarti “Aku akan mengutus/mengirim”.³¹ Dengan kata lain, ditunjukkan bahwa Allah sendirilah yang bertindak (menjadi aktor-inisiatör) dalam memilih utusan-Nya. Maka, dari sisi sekarang, dapat menyebutnya sebagai tindakan politis Allah dalam rangka pemenuhan tujuan-Nya. Apa yang menjadi tujuan-Nya? Adalah menyelamatkan umat-Nya dari tangan orang Filistin (ay. 16b) dalam konteks 1 Samuel 9:16 khususnya pada proses pengurapan Saul menjadi raja atas Israel. Senada dengan itu, Sihombing menandaskan bahwa politik dalam PL dapat dimaknai dari sisi pemenuhan tujuan Allah bagi umat-Nya melalui orang-orang-Nya.³² Karenanya, sekali pun tua-tua Israel menyampaikan kesepakatan politis mereka kepada Allah melalui Samuel, tetap tindakan dan tujuan politis Allahlah yang terlaksana. Tentu, ada hak politik dari umat Israel yang diberikan Allah kepada mereka untuk menyatakan pendapat/suaranya dan Allah menyediakan ruang untuk itu.

Selanjutnya, Allah telah menolak Saul sebagai raja atas Israel. Pesan Allah tentang penolakannya terhadap Saul disampaikan oleh Samuel (1Sam. 15:26), alasannya sederhana dan mendasar yaitu karena Saul tidak mengindahkan perintah Allah. Tidak butuh waktu lama Allah segera menyiapkan seorang yang dalam pandangan-Nya layak untuk menggantikan posisi Saul sebagai raja. Rencana pergantian itu dipesankan Allah kepada Samuel (1Sam. 16). Allah berfirman kepada Samuel, “... berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan perlilah. Aku mengutus

³¹Klein, 98.

³²Sihombing, “Politics Based on a Biblical Perspective and Its Implications for the Involvement of Believers in Politics”, 71.



engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagi-Ku (1Sam. 16:1).” Dapat terlihat dengan jelas proses yang ditempuh oleh Allah untuk menunjukkan tindakan politis-Nya di dalam menentukan seorang raja bukan saja bagi bangsa Israel tetapi terutama adalah bagi-Nya.

Menarik untuk menelusuri makna dari dua frasa yang muncul, yaitu “Telah kupilih” dan “Seorang raja bagi-Ku”. Kedua frasa itu dalam bahasa aslinya adalah קָרַא־תִּקְרֹב (qal perfect yang dapat berarti *for I have provided* dan לִי מֶלֶךְ (li me-lek) dapat diartikan *a king for Myself*.³³ Dengan sederhana dapat dimaknai bahwa Allah telah menyediakan seorang raja bagi-Nya. Karenanya, perlu menjadi catatan, bahwa Allah sendirilah yang telah menyediakan raja yang ada dalam kontrol-Nya. 1 Samuel 16:7 memaparkan kemudian raja yang telah disediakan Allah untuk diurapi oleh Samuel itu karakteristiknya bukan terletak pada parasnya, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Mengapa penegasan mengenai karakteristik ini menjadi penting? Lagi-lagi itu mengindikasikan proses dari pemilihan yang dilakukan Allah begitu serius sampai ke kedalaman hati dari calon pemimpin yang akan ia pilih sendiri bukan berdasar pada standar manusia, tetapi standar-Nya.³⁴

Pilihan Allah itu terkonfirmasi ketika Samuel bertanya kepada Isai: “Inikah anakmu semuanya?” Jawabnya: “Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalaan kambing domba.” Kata Samuel kepada Isai: “Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia dating ke mari.” Anak bungsu Isai adalah Daud. Cook menandaskan bahwa yang dikehendaki dan menjadi pilihan Allah adalah raja yang takut/tunduk kepada-Nya bukan yang elok parasnya.³⁵ Sebenarnya itu mempertegas bahwa Allahlah yang tetap memerintah melalui perantaraan raja yang Ia pilih dan angkat sendiri. Hal ini juga diutarakan oleh Zimran dengan berkata bahwa Raja yang sesungguhnya tetaplah Allah meski pun Daud yang diurapi oleh Samuel.³⁶

³³Klein, *Word Biblical Commentary: 1 Samuel*, 161.

³⁴David Toshio Tsumura, *The New International Commentary on the Old Testament: The First Book of Samuel* (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2007), 274-5.

³⁵David M Cook, “Theme in the Books of Samuel,” *Themelios* 45, no. 3 (2020): 521–2.

³⁶Yisca Zimran, “Look, the King Is Weeping and Mourning?: Expressions of Mourning in the David Narratives and Their Interpretive Contribution,” *Journal for the Study of the Old Testament* 42, no. 4 (2018): 509. doi: 10.1177/0309089216692181.



Itulah mengapa, pada bagian selanjutnya, Allah memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud, dan sejak hari itu sampai seterusnya berkuasalah Roh TUHAN atas Daud (ay. 12-13). Sederhananya, dapat dikatakan bahwa intinya adalah pada kedaulatan Allah yang menjalankan tindakan politis-Nya dalam rangka memproklamirkan kuasa-Nya melalui raja yang Ia proses dan tentukan sendiri. Karenanya, kesimpulan yang dapat diberikan dari proses hermeneutika 1 Samuel 8:4-9 dan 16:7, 11-13 adalah terkait peran Allah yang secara aktif terlibat “Berpolitik” untuk menentukan suksesi kepemimpinan di Israel. Setiap proses, mulai dari siapa yang akan ditemui Samuel, bagaimana Allah menunjukkan orang yang Ia tentukan, kemudian dilakukan pengurapan oleh-Nya melalui Samuel sejak raja pertama, yaitu Saul. Namun demikian, Ia juga menunjukkan penolakannya terhadap Saul yang terjadi karena Saul tidak takut/tunduk kepada-Nya, sebab sebenarnya Allahlah Raja yang sejati.

Selanjutnya, Ia segera menyediakan pengganti Saul dengan proses yang jelas, dan dapat disebut sebagai *providensia* Allah. Ia menunjukkan standar-Nya sendiri dalam pemilihan terhadap raja, di mana utamanya berfokus pada raja yang takut/tunduk kepada-Nya. Dengan kata lain, Ia memilih raja yang hendak memenuhi dan atau menjalankan rencana atau tujuan-Nya bagi bangsa-Nya. Suksesi kepemimpinan yang terjadi seluruhnya ada dalam kedaulatan-Nya dan kekuasaan-Nya. Artinya, Allah sendirilah yang sedang berpolitik dan suara serta ketetapan-Nyalah menjadi suara dari bangsa-Nya, sehingga tidak harus *vox populi* sebagai *vox dei*, tetapi sebaliknya *vox dei* sebagai *vox populi*.

Politik (Pilpres-2024) dalam Perspektif 1 Samuel 8:4-9; 16:7, 11-13

Pemaparan hermeneutika dari 1 Samuel 8:4-9 dan 16:7, 11-13 dimaksudkan sebagai perspektif biblis dalam rangka memaknai politik (Pilpres 2024) yang akan datang. Telah diberi kesimpulan bahwa sebagian besar proses politik (Pilpres) sejak tahun 2004 sampai saat ini (menjelang Pilpres 2024) menitikberatkan pada peran manusia (rakyat) yang diwadahi oleh Partai Politik. Artinya, harapan untuk menghadirkan suksesi kepemimpinan bagi bangsa Indonesia difasilitasi oleh negara, melalui diberlakukannya Pemilihan Presiden setiap lima tahun sekali dan dipilih langsung oleh rakyat. Karenanya, tahun 2024 menjadi waktu berlangsungnya pesta demokrasi untuk memilih siapa yang layak menjadi Presiden (pimpin) di bumi pertiwi ini. Itulah sebabnya, sebagaimana telah dibahas di atas, masing-masing Partai Politik berupaya menciptakan



koalisi untuk mengusung bakal Calon Presiden dan bakal Calon Wakil Presidennya.

Gambaran/peta perpolitikan yang ada saat ini di Indonesia (hlm. 8), narasi-narasi yang dimunculkan baik dari sisi kekuasaan dan juga oposisi, seluruhnya diharapkan bermuara kepada kepentingan dan kemajuan bangsa. Namun demikian, kenyataan yang terjadi adalah, kesepakatan dan atau tawaran politiklah (*bargaining politics*) yang lebih mendominasi belakangan ini. Dengan demikian, dapat dipahami urgensi dari pergerakan-pergerakan masing-masing pimpinan Partai Politik dalam rangka melakukan lobi-lobi politik. Pada gilirannya, menjadi perlu melihat persamaan antara kondisi perpolitikan di Indonesia dan suksesi kepemimpinan (nuansa politisnya) dalam 1 Samuel 8:4-9 dan 16:7, 11-13. Setidaknya, ada tiga hal utama yang menjadi persamaannya. Pertama, semua umat Israel yang diwadahi oleh tua-tua Israel menghendaki terjadinya suksesi kepemimpinan, sama halnya dengan rakyat Indonesia yang diwadahi oleh Partai Politik juga menghendaki pergantian Presiden. Kedua, semua tua-tua Israel berkumpul dan bersepakat menyatakan suaranya, sama halnya dengan demokrasi melalui Pemilihan Presiden di Indonesia. Ketiga, umat Israel akan tunduk kepada kewenangan raja dengan segala kewenangannya (1Sam. 8:10-22), rakyat Indonesia mengakui Presiden sebagai Kepala Negara dengan segala kewenangannya sesuai Undang-Undang. Itulah yang menjadi persamaannya.

Setelah melihat persamaannya, maka bagian yang terpenting adalah memaknainya dari perspektif 1 Samuel 8:4-9 dan 16:7, 11-13 dengan berfokus pada tindakan politis Allah. Jelaslah bahwa ketiga persamaan di atas berfokus pada peran rakyat (manusia) baik melalui tua-tua Israel dan juga melalui Partai Politik (Indonesia) dengan segala kesepakatan politis yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, perlu ditegaskan kembali terkait peran Allah dalam proses politik itu. Kisah suksesi kepemimpinan dari seorang hakim kepada seorang raja baik zaman Saul dan zaman Daud telah menunjukkan keterlibatan Allah yang total dalam seluruh prosesnya. Terkait hal ini Brett memberi penegasan bahwa suksesi kepemimpinan dalam 1 Samuel 8-9 terlihat sisi (*divine sovereignty*) melalui tindakan Allah yang menunjuk Saul sebagai raja atas Israel.³⁷ Tidak lama setelah itu, juga ditunjukkan tindakan politis Allah yang menyediakan pengganti Saul, sebab Allah telah menolaknya menjadi raja atas Israel. Akhirnya, Daud dipilih dan

³⁷Mark G. Brett, *Locations of God: Political Theology in the Hebrew Bible* (New York: Oxford University Press, 2019), 3.



diurapi menjadi raja bukan berdasarkan standar manusia melainkan standar Allah dalam rangka menunjukkan bahwa Allahlah Raja yang sejati.

Dengan demikian, proses perpolitikan (Pilpres) yang akan terselenggara pada tahun 2024 mendatang dalam perspektif 1 Samuel 8:4-9 dan 16:7, 11-13 ada dalam kedaulatan dan kekuasaan-Nya Allah. karenanya, persiapan-persiapan dan koalisi dari berbagai Partai Politik yang ada dapat digunakan oleh Allah sebagai kendaraan politis-Nya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden yang Ia kehendaki. Melalui Presiden dan Wakil Presiden itu Ia akan melaksanakan maksud-maksud politis-Nya yang seolah maksud politis Partai Politiklah yang terlaksana. Dengan demikian, perspektif 1 Samuel 8:4-9 dan 16:7, 11-13 sedang membukakan pemaknaan mengenai Allah yang berpolitik (*Theopolitics*). Itulah, yang mendasari perlunya memaknai perpolitikan (Pilpres 2024) dari pergeseran konsep *politics* (manusia) ke *Theopolitics* (Allah).

DARI *POLITICS* KE *THEOPOLITICS*: SEBUAH TAWARAN TEOLOGIS-BIBLIS

Bercermin dari realita perpolitikan (Pilpres) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang di Indonesia dan proses hermeneutika 1 Samuel 8:4-9; 16:7, 11-13 dapat ditarik sebuah tawaran teologis-biblis. Tawaran teologis-biblis yang diusulkan adalah pemaknaan atau pergeseran makna dari yang awalnya menekankan *Politics* kepada sesuatu fokus baru, yang disebut dengan *Theopolitics*. Tidak jarang orang Kristen atau gereja menolak untuk sepakat dengan argumen yang berkata bahwa Allah berpolitik, sebab kesan yang dihadirkan seolah negatif. Namun demikian, sekali lagi proses hermeneutika 1 Samuel 8:4-9; 16:7, 11-13 dalam rangka memaknai perpolitikan (Pilpres 2024) di Indonesia telah menunjukkan bahwa Allah memang berpolitik sejak awal terjadinya suksesi kepemimpinan di Israel. Mengapa tidak perlu khawatir dan justru harus terbuka pada kenyataan bahwa Allah berpolitik? Sebab, nuansa politis yang ditunjukkan adalah politiknya Allah, bukan bersandar dan atau berdasar pada politiknya manusia. Karenanya, pemahaman selama ini telah digiring pada slogan yang terkenal, yaitu *vox populi vox dei* justru menutup kekayaan politiknya Allah. Justru harus tiba pada kesimpulan bahwa *vox dei vox populi*, sehingga terbuka pada kekayaan politiknya Allah. Kekayaan politiknya Allah yang dimaksud adalah bagaimana Ia telah menunjukkan proses pemilihan raja di Israel dengan tetap memberikan hak “Bersuara” kepada tua-tua Israel yang mewakili rakyat Israel. Kekayaan politis-Nya juga



terletak pada ketidakengganan-Nya menolak Saul sebagai raja karena tidak takut/tunduk kepada-Nya.

Lanjut kepada pemilihan-Nya pada Daud sebagai raja sesuai standar-Nya sampai menelisik ke kedalaman hatinya. Tujuannya adalah agar raja itu takut dan tunduk kepada-Nya, sehingga tetap Allah yang menjadi Raja atas umatnya. Dengan demikian, proses politik (Pilpres 2024) di Indonesia dapat dilihat dari perspektif tindakan politis Allah yang sedang mengerjakan proses pemilihan-Nya atas masing-masing calon Presiden yang diusulkan oleh masing-masing Partai Politik. Gambaran/peta perpolitikan yang bergerak dinamis tersebut dapat menjadi kendaraan politis-Nya Allah dalam rangka menunjukkan bahwa Ialah yang berdaulat dan berkuasa dan menyatakan kemenangan-Nya atas bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Proses perpolitikan, khususnya Pemilihan Presiden di Indonesia yang akan terselenggara pada tahun 2024 telah dimaknai dari perspektif 1 Samuel 8:4-9 dan 16:7, 11-13. Pemaknaannya memberikan dan atau berdasar pada khazanah berpikir teologis-biblis yang menunjukkan pergeseran signifikan, dari konsep “*Politis*” ke “*Theopolitics*”. Artinya, tidak lagi berfokus dan bersandar pada tindakan-tindakan politis terkait siapa dan apa yang mampu dilakukan rakyat (manusia). Bercermin dari kisah sukses kepemimpinan zaman Samuel yang digunakan untuk memaknai sejarah politik di Indonesia sejak tahun 2004 (dimulainya pemilihan langsung) sampai saat ini.

Tidak terlalu berlebihan jika diberi kesimpulan bahwa seluruhnya ada dalam kedaulatan Allah (*divine-sovereignty*) yang telah menyediakan pemimpin-Nya sendiri (*divine-providence*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Allahlah yang sedang dan akan terus menjalankan politiknya (*Theopolitics*) dalam rangka pemenuhan tujuan politis-Nya sendiri. Maka dari itu, pertanyaan siapa sebenarnya yang sedang berpolitik dan apa tujuannya telah diungkapkan melalui tulisan ini. Pada akhirnya, melalui proses perpolitikan (Pilpres) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang dapat disimpulkan bahwa *vox dei* sebagai *vox populi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Nicholas Ryan. “SBY Terpojok, Diminta Elite Parpol Agar Tak Buat Gaduh Jelang Pemilu 2024.” kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/07341501/sby->



terpojok-diminta-elite-parpol-agar-tak-buat-gaduh-jelang-pemilu-2024.

Alex Arifianto Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala Indonesia, Yonatan, and Aji Suseno Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. “Filsafat Politik Dan Praktisnya Dalam Perspektif Iman Kristen.” *Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 2 (2020): 2087–7927. <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/antusias>.

Angrainy, Firda Cynthia. “Survei Capres Charta Politika: Ganjar, Prabowo Dan Anies Masih 3 Besar.” [news.detik.com](https://news.detik.com/berita/d-6050167/survei-capres-charta-politika-ganjar-prabowo-dan-anies-masih-3-besar), 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6050167/survei-capres-charta-politika-ganjar-prabowo-dan-anies-masih-3-besar>.

Aspinall, Edward and Berenschot, Ward. *Democracy for Sale Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Badrun, Ubedilah. *Sistem Politik Indonesia: Kritik Dan Solusi Sistem Politik Yang Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Baldwin, Joyce G. *Tyndale Old Testament Commentaries 1 and 2 Samuel Volume 8*. England: InterVarsity Press, 2008.

Barokah, Fitria, Tabah Maryanah, Ari Darmastuti, and Hertanto Hertanto. “Disrupsi Politik.” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>.

Brett, Mark G. *Locations of God: Political Theology in the Hebrew Bible*. New York: Oxford University Press, 2019.

Chaniago, Arifki. “Pilpres 2024: Berebut Narasi Ruang Publik.” [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/09340491/Pilpres-2024-berebut-narasi-ruang-publik), 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/09340491/Pilpres-2024-berebut-narasi-ruang-publik>.

Cook, David M. “Theme in the Books of Samuel.” *Themelios* 45, no. 3 (2020): 515–27.

Ekawati, Esty. “Peta Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru.” *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7, no. 2 (2019): 160. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2680>.



- Harnawansyah, M. Fadhillah. *Sistem Politik Di Indonesia*. Surabaya: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020.
- Jalal, Asran. "Sistem Presidensial Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2021): 166–84. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i2.1256>.
- Klein, Ralph W. *Word Biblical Commentary: 1 Samuel*. Second. Nashville: Thomas Nelson, Inc., 2000.
- Lutfi, Muhammad, and Mochamat Nurdin. "Presidential Threshold : Harapan Dan Tantangan Bacalon Presiden 2024 Presidential Threshold: Expectations and Challenges of the Presidential Candidate 2024." *Journal of Government Insight* 2, no. 1 (2022): 150–64. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>.
- Madril, Oce, and Universitas Gadjah Mada. "THE AUTHORITY OF ADMINISTRATIVE COURT IN SETTLING Faculty of Law , Universitas Gadjah Mada." *Yustisia Jurnal Hukum* 8, no. 3 (2019): 365–84. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.35553>.
- Muazam, Achmad Rizki. "SBY Turun Gunung, Jusuf Kalla: Itu Peringatan Bagi Penguasa!" populis.id, 2022. <https://populis.id/read35516/sby-turun-gunung-jusuf-kalla-itu-peringatan-bagi-penguasa>.
- Paat, Yustinus. "Ini Peta Politik Koalisi Partai Politik Menuju Pilpres 2024." beritasatu.com, 2022. <https://www.beritasatu.com/news/978715/ini-peta-politik-koalisi-partai-politik-menuju-Pilpres-2024>.
- Putra, Adi. "Monarki: Penolakan Terhadap Teokrasi." *Explore Contact FAQ*, 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4zqau>.
- Romli, Lili. "Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 8, no. 2 (2018): 95–118. <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1138>.
- Sihombing, Salomo. "Politics Based on a Biblical Perspective and Its Implications for the Involvement of Believers in Politics." *Jurnal Jaffray* 20, no. 1 (2022): 58–73. <https://doi.org/10.25278/jj.v20i1.619>.
- Sipahutar, Roy Charly. "TEOKRASI DAN DEMOKRASI: Komparasi



- Reflektif Teokrasi Israel Kitab Suci Dengan Demokrasi Langsung Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Tangkole Putai* 15, no. 2 (2018): 86–101. <http://jurnal.iaknambon.ac.id/index.php/TP/article/view/22>.
- Susanta, Yohanes Krismantyo. “Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan Adonia Dalam Persaingan Menuju Takhta.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019): 22–36. <https://doi.org/10.30648/dun.v4i1.187>.
- Tsumura, David Toshio. *The New International Commentary on the Old Testament: The First Book of Samuel*. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2007.
- TvOne. “Silang Pendapat, Adian Napitupulu VS Jansen Sitindaon Soal Akan Ada Kecurangan Di Pemilu 2024.” tvOneNews, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=iUW4aNBB8qc>.
- Wahdini, Muhammad. “The Effectiveness of Simultaneous Election 2019: Evaluation Through the Simultaneous Election 2024.” *Jurnal Bina Praja* 14, no. 1 (2022): 123–34. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.123-134>.
- Zimran, Yisca. ““Look, the King Is Weeping and Mourning!”: Expressions of Mourning in the David Narratives and Their Interpretive Contribution.” *Journal for the Study of the Old Testament* 42, no. 4 (2018): 491–517. <https://doi.org/10.1177/0309089216692181>.

